Indigenous Knowledge

Volume 4 Number 2 (2025): December
E-ISSN: 2746-3662
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Peran Pancasila dalam Antisipasi Permasalahan Bangsa

Mar'ah Sholikhah[1], Naila Alifa Putri [2], Ragasita Wahyuningjati[3]

123Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Corresponding author's email: nailaalifa.0844putri@student.uns.ac.id, ragasitasita1616@student.uns.ac.id, msholikhah186@student.uns.ac.id

Abstrak: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan dalam MPR No. XVIII Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 perihal Pencabutan P4 dan Penetapan wacana Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam ketetapan MPR itu menyatakan Pancasila wajib dijalankan secara konsekuen serta konsisten menjadi dasar negara, Pancasila pula berfungsi sebagai kaidah negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh DPRMPR hasil pemilu. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan mempunyai landasan yang kokoh buat menjalankan kebijakan dan mengelola kepentingan yang beragam di dalam negeri. Namun Pancasila juga pernah sebagai kontroversi sepanjang sejarah Indonesia. Ada yang menilai Pancasila tak memberikan ruang yang relatif cukup bagi keberagaman pada Indonesia, sebagai akibatnya terdapat karakter yang ingin melengkapi atau memodifikasi sila-sila Pancasila.

Kata kunci: Dasar Negara; Pancasila; Persatuan

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang besar, negara multikultural. Tetapi akhir-akhir ini banyak terjadi konflik di negara ini. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, baik agama, ras, suku, maupun politik, menunjukkan bahwa nilai persatuan dalam Pancasila belum terimplementasi secara maksimal dalam kehidupan berbangsa. Elit politik terkesan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan rakyat, hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sangat penting dalam mengatasi permasalahan bangsa, dan generasi muda harus mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dahulu digunakan untuk mempersatukan bangsa dan mengatur politik, menjadikan para elite politik bersatu demi kemajuan bangsa, bukan demi kepentingan kelompok. Sebagai masyarakat harus mampu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan melaksakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar lambang negara akan tetapi adalah cerminan sikap dari masyarakat bangsa ini. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila dapat digunakan dalam mengatasi konflik yang ada dalam bangsa ini, dengan merujuk dimasa lampau dimana Pancasila digunakan oleh pemimpin dahulu untuk mempersatukan bangsa ini tanpa menimbulkan perpecahan justru mempererat persatuan. Dan juga Pancasila digunakan untuk mengatur politik dimasa lampau yang membuat para elite politik saling bersatu untuk kemajuan bangsa ini, bukan untuk

kepentingan kelompok. Sehingga dalam paper ini bertujuan agar para pembaca memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang berpancasila.

2. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta dan terdiri dari dua kata, panca yang berarti “lima” dan sila yang berartilandasan, azas atau asas. Jadi Pancasila artinya lima landasan atau lima asas atau limaasas. Kelima asas/asas/asas inilah yang menjadi rumusan dan pedoman kehidupanbernegara dan berbangsa seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia, sesuai dengan pernyataan dalam pembukaan keempat UUD 1945 bahwa“…Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat rakyat yangberdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kepemimpinan demokrasi yang cerdas, musyawarah/perwakilan,dan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Meskipun isi danrangkaian Sila Pancasila berkembang melalui beberapa tahapan pada masa perumusanPancasila 1945 Meskipun ada Meski telah berubah, tanggal 1 Juni tetap diperingati sebagai hari lahir Pancasila.

I. Konsep Pancasila Menurut Moh Yamin

Sebelum dirumuskan dan diberi nama, konsep Pancasila telah dirancang sejak hari pertama konferensi BPUPKI yang pertama. Pada tanggal 29 Mei1945, Muhammad Yameen mengusulkan lima prinsip: nasionalisme, kemanusiaan, ketuhanan, ideologi rakyat, dan kesejahteraan rakyat.

II. Konsep Pancasila Menurut Soepomo

Pada itanggal 31 Mei 1945, hari ketiga konferensi BPUPKI yang pertama, Supomo juga mengusulkan lima landasan negara: kesatuan rakyat, hubungan darah, perimbangan internal dan ek-sternal, permusyawaratan dan keadilan.

III. Konsep Pancasila Menurut Sukarno

Pada hari keempat rapat pertama BPUPKI, Sukarno mengusulkan lima prinsip nasional, antara lain nasionalisme Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, konsensus atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Jika kelima sila tidak tercapai kesepakatan, Sukarno menyarankan untuk menyingkatnya menjadi Trisila (Sosial Nasionalisme, Sosial Demokrasi, dan Ketuhanan). Kalau Trisila juga tidak dikenal, bisa disingkat menjadi Ekasila yang artinya gotong royong.

IV. Komite Beranggotakan Delapan Orang

Setelah semua proposal diserahkan, dibentuklah sebuah komite kecil yang beranggotakan delapan orang. Anggota-anggota tersebut antara lain Sukarno, Moh Hatta, Sutarjo, A. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Mohammad Yamin dan A.A. Malamis. Subkomite ini bertugas menampung dan menyelesaikan usulan anggota BPUPKI. Dilihat dari usulan yang diterima, variasinya cukup besar. Kelompok Islam menginginkan negara diatur berdasarkan hukum Islam, sedangkan kelompok nasionalis menginginkan negara tidak diatur berdasarkan hukum agama tertentu.

V. Komite Beranggotakan Sembilan Orang

Untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini, sebuah komite kecil baru yang beranggotakan sembilan orang dibentuk, yang dikenal sebagai "Komite Sembilan". Sembilan anggota panitia mewakili kelompok Islam dan nasionalis, termasuk Sukarno, Mohatta, Muhammad Yameen, AA Malamis, Ahmed Subajo, Abikusno Chauk Rossojoso, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hashim dan Agus Salim. Rapat komite beranggotakan sembilan orang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945 mencapai kesepakatan pokok yang lazim dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang memuat:

• Dewa yang wajib menegakkan hukum Islam bagi pengikutnya

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Unifikasi Indonesia

• Demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan dan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

VI. Konferensi iBPUPKI ike-2

Pada Konferensi BPUPKI ke-2 yang diadakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, dicapai kesepakatan untuk menggunakan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Selain itu, disepakatipula hal-hal lain dalam pertemuan tersebut, seperti pemerintahan republik, kesepakatan wilayah, dan pembentukan tiga subkomite, yaitu Komite Perancang Konstitusi, Komite Ekonomi dan Keuangan, dan Komite Pertahanan Dalam Negeri.

VII. Penetapan iPancasila

Pada rapat Partai Komunis Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 disepakati secara bulat untuk mengubah sila ipertama Pancasila menjadi “ketuhanan Yang Maha Esa”. iIstilah

"hukum Islam" dan ketentuan terkait dihapuskan. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat dan negara yang berbeda ras dan agama. Perubahan ini diyakini mencerminkan tingginya tingkat toleransi serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain mengubah asas pertama, rapat DPR RI ini juga mengambil tiga keputusan penting, yaitu pengesahan konstitusi negara, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan penetapan presiden untuk sementara dibantu oleh Dewan Nasional Pusat. Indonesia (KNIP). Sampai MPR/DPR terbentuk.

3. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan dalam MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam ketetapan MPR itu menegaskan Pancasila harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi menjadi kaidah negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh DPR/MPR hasil pemilu. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang iterdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki landasan yang kokoh untuk menjalankan kebijakan dan mengelola kepentingan yang beragam di dalam negeri. Namun Pancasila juga pernah menjadi kontroversi sepanjang sejarah Indonesia.Ada yang menilai Pancasila tidak memberikan ruang yang cukup bagi keberagaman di Indonesia, sehingga ada kelompok yang ingin melengkapi atau memodifikasi sila-sila Pancasila. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu terus memajukan dan memperkuat makna dan makna Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia yang berorientasi pada keberagaman. Selain itu, pemerintah harus terus memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip Pancasila dan memberikan ruang yang cukup bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Pancasila juga menjadi landasan penting bagi pembangunan perekonomian Indonesia.

Pancasila mencakup nilai-nilai keadilan social yang dapat menjadi landasan kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengelola kesehatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga memuat nilai-nilai persatuan Indonesia yang dapat menjadi landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan perekonomian yang fokus padakesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dengan demikian,Pancasila dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengelola kebijakan perekonomian yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara pemerintah Indonesia meneguhkan arti dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negaraadalah dengan iterus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Pancasila. Pemerintah dapat melakukan hal tersebut dengan mengintegrasikan pendidikan Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan Pancasila di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat

mempertegas makna dan makna Pancasila dengan terus memastikan kebijakan iang diambil sejalan dengan sila Pancasila. Pemerintah dapat melakukan hal ini dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambilnya berfokus pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta berfokus pada persatuan dan keberagaman di Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang berdasarkan pada kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan, dan Masyarakat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Arti dan implikasi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut:

a) Ketuhanan Yang Maha Esa
Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang religius dan agama merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Menegaskan bahwa hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi oleh negara, dan setiap orang harus saling menghormati dan diperlakukan secara adil.

c) Persatuan Indonesia
Menyadari bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan setiap orang harus bertoleransi terhadap keberagaman yang ada di dalam negeri.

d) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang mengikutiaturan yang ditetapkan melalui mekanisme konsultatif/perwakilan

e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Menegaskan bahwa setiap orang harus memperoleh keadilan sosial yang setara dan setiap orang harus memperoleh persamaan hak dalam pelayanan publik.

• Empat pokok pikiran dari nilai pancasila :
1) Keyakinan besar yang pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi Indonesia seluruhnya dan tanah air Indonesia seluruhnya dan mengalahkan perseorangan. Dan kelompok. Ini adalah pemurnian dari sila ketiga pancasila.

2) Pandangan kedua menyatakan bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa berarti berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bersama seluruh warganya, mencerdaskan ikehidupan irakyatnya, idan iikut iserta idalam imewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini adalah penyempurnaan dari Perintah Kelima.

3) Pandangan ketiga menyatakan bahwa negara berdaulat berdasarkan demokrasi dan musyawarah/perwakilan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Ini adalah penyempurnaan dari Perintah Keempat.

4) Pandangan keempat menyatakan bahwa bangsa didasarkan pada isatu tuhan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Ide dasar ini berarti bahwa negara Indonesia mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ini adalah penyempurnaan dari perintah pertama dan kedua, dan keempat poin utama ini adalah fondasi dasar berdirinya suatu bangsa. Selain iiu, keempatnya akan diimplementasikan dalam bentuk ketentuan UUD 1945.

4. Kesimpulan

Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta dan terdiri dari dua kata, panca yang berarti “lima” dan sila yang berarti landasan, azas atau asas. Jadi Pancasila artinya limalandasan atau lima asas atau lima asas. Kelima asas/asas/asas inilah yang menjadi rumusan dan pedoman kehidupan bernegara dan berbangsa seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan dalam MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam ketetapan MPR itu menegaskan Pancasila harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi menjadi kaidah negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh DPR/MPR hasil pemilu. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan,keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan symbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang berdasarkan pada kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan.

Referensi

detik.com 09 Sep 2021.9 Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia .Diakses pada 15 september 2023 .https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5716034/9-fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-indonesia.

detik.com 20 Jul 2022.Makna Pancasila sebagai Dasar Negara, Pengertian, Kedudukan, dan Fungsinya.Diakses pada 15 September 2023.https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6188845/makna-pancasila-sebagai-dasar-negara-pengertian-kedudukan-dan-fungsinya.

jambiprov.go.id/9 Januari 2023. Pancasila Sebagai Dasar Negara: Makna, Arti, dan Fungsi.Diakses pada 15 september 2023. https://pasla.jambiprov.go.id/pancasila-sebagai-dasar-negara-makna-arti-dan-fungsi/

cnnindonesia 28 Mei 2023 .Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara bagi Bangsa Indonesia" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230523162021-569-953037/fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-bagi-bangsa-indonesia.

Hukumonline 24 Juli 2023Makna dan Kedudukan Pancasila sebagai Dasar NegaraDiakses pada 15 september 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/pancasila-sebagai-dasar-negara-lt61f23142a7e13/